

ABSTRAK

Risa Susilawati (1148010252): Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah pokok: implementasi kebijakan Peraturan Desa di Desa Karangsewu yang belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kritis yaitu komunikasi kebijakan yang belum maksimal, sumber daya yang belum memadai dan struktur birokrasi yang tidak dijalankan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam implementasi kebijakan Peraturan Desa Karangsewu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang berupa data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan pengamatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum maksimal dilakukan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan tersebut belum maksimal tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Sumber daya yang dimiliki oleh kebijakan Perdes Karangsewu nomor 3 tersebut yaitu masih belum memadai, baik dari staf yang sudah mencukupi dari segi kuantitasnya tetapi belum mencukupi dari segi kualitas, maupun dari segi fasilitas, Desa Karangsewu masih membutuhkan komputer, bangunan yang luas, dan jaringan telekomunikasi terutama jaringan internet. Sikap para implementor sudah baik, namun dalam pengangkatan birokrat belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengangkatan yang diharapkan. Pemerintahan desa belum memiliki dana yang cukup untuk dijadikan sumber dana insentif. Laporan yang diberikan terlambat dilakukan sebab pemerintahan sebelumnya tidak tertib administrasi. Kemudian dari koordinasi secara langsung masih terhambat dikarenakan akses menuju pusat pemerintahan daerah kabupaten Garut memiliki jarak yang cukup jauh dan harus melewati akses jalan yang sulit untuk ditempuh dengan cepat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa

ABSTRACT

Risa Susilawati (1148010252): Policy Implementation of Karangsewu Village Regulation Number 3 of 2016 concerning Village Revenue and Expenditure Budget 2017 Fiscal Year

This research was conducted based on the main problem: policy implementation of Karangsewu village regulation that has not been implemented doing well. This is caused by a few of critical factors, that are communicated policies that have not been maximized, inadequate of resources and bureaucratic structures that are not implemented optimally. The purpose of this research is to find out in depth the policy implementation of Karangsewu Village Regulation Number 3 of 2016 concerning Village Revenue and Expenditure Budget 2017 Fiscal Year.

The research method used in this research is case study research with a qualitative approach. This research was conducted in Karangsewu Village, Cisewu District, Garut Regency. Data sources used are primary data sources and secondary data sources in the form of qualitative data. Data collected was done by structured interview techniques and observations.

The results of this study indicate that policy implementation has not been maximally carried out. Communication in implementing the policy has not been maximally conveyed to the entire community. The resources owned by Karangsewu village regulation number 3 are still inadequate. Both of the staff are sufficient in terms of quantity but not sufficient in terms of quality. As well as in terms of facilities, Karangsewu Village still needs computers, extensive buildings, and telecommunications networks, especially the internet network. The attitude of the implementors is already good, but in appointing bureaucrats it has not fully met the criteria he had expected appointment. The village government does not yet have sufficient funds to be used as a source of incentive funds. The reports that were given were late because the previous administration have not an orderly administration. Then from direct coordination is still hampered because access to the central government district of Garut district has a considerable distance and must pass through access roads that are difficult to travel quickly.

Keywords: Policy Implementation, Village Regulation